



Reformasi Pendidikan Nasional

Ade Sakila^{1*}, Aryati²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

adesakila2@gmail.com¹, aryati691@gmail.com²

ARTICLE INFO

History of the article :

Received 05 Januari 2022

Revised 1 Mei 2023

Accepted 30 Mei 2023

Available online 22 June 2023

Keywords:

Reformasi ;pendidikan; nasional

* Correspondence:

adesakila2@gmail.com

ABSTRACT

Jurnal ini mencoba untuk menguraikan permasalahan Umum yang sering muncul dalam dunia pendidikan nasional khususnya di Indonesia. Pendidikan yang sedianya menjadi jembatan untuk mewujudkan Manusia yang seutuhnya tidak terlepas dari berbagai macam Persoalan, mulai dari permasalahan sarana dan prasarana, Kesenjangan antara apa yang dipelajari dan diajarkan di sekolah Dengan permasalahan hidup yang terjadi di sekitar, tidak relevannya Output dunia pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja, terbatasnya Kesempatan untuk mengenyam pendidikan di sekolah sampai dengan Mirisnya nasib guru sebagai agen perubahan dalam lembaga Pendidikan selalu menjadi penghias media massa baik cetak Maupun elektronik. Untuk menyelesaikan berbagai macam Persoalan tersebut tentu tidak semudah membalikkan telapak Tangan, dibutuhkan kesadaran dan kerjasama berbagai pihak agar Permasalahan-permasalahan umum tersebut dapat dikikis perlahan-Lahan, dengan harapan tujuan pendidikan yang diamanatkan oleh Para founding fathers bangsa Indonesia dapat diwujudkan. Jurnal Ini dengan segala keterbatasannya berusaha menguraikan berbagai Macam persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia sekaligus Menawarkan langkah pemecahannya.

PENDAHULUAN

Reformasi pendidikan pada umumnya terjadi dengan adanya tuntutan kebutuhan masyarakat pada saat itu. Pendidikan diharapkan dapat menyiapkan produk manusia yang mampu mengatasi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, akan lebih mudah mengidentifikasi krisis pendidikan yang terjadi, dengan didasarkan pada indikator yang diukur dari tidak tercapainya tujuan tekanan pendidikan itu. Masyarakat yang belum “melek” Iptek, merupakan gejala krisis pendidikan yang menekankan pada Iptek. Meningkatnya tingkat kemiskinan, meluasnya tenaga yang tidak memiliki keterampilan, para pekerja yang tidak disiplin dan tidak kompetitif, dapat dinyatakan sebagai krisis pendidikan yang menekankan pada tekanan ekonomi. Masyarakat yang tidak memiliki jati diri bangsa, yang nasionalismenya lemah, dan tidak memiliki rasa persatuan dan kesatuan bangsa dapat dinyatakan sebagai krisis pendidikan yang menekankan pada integritas bangsa[1].

Saat ini pendidikan kita telah ditekankan pada integritas bangsa, tetapi belum didukung oleh tekanan Iptek dan ekonomi. Oleh karena itu, relevansi pendidikan mulai menjadi topik penting dalam strategi pendidikan di Indonesia agar pendidikan kita bermakna bagi kehidupan, diri sendiri, maupun masyarakat. Perlu menjadi perhatian kita semua seberapa jauh perubahan pendidikan kita dapat ditarik linearitas pertumbuhannya yang menunjukkan semakin

meningkatnya kualitas. Justru hal ini yang belum jelas, perubahan-perubahan yang terjadi makin tampak sporadis.

Kalau kita sekarang ingin melakukan reformasi pendidikan yang benar-benar mendasar, maka kita harus melakukan perubahan yang dapat mengembalikan wawasan profesionalisme yang telah hilang. Kita harus melakukan perubahan yang dapat mengembalikan semangat patriotisme kepada sistem pendidikan kita. Kita harus membuat perubahan yang dapat membuat sistem pendidikan kita memahami proses sosio-kultural yang sedang berlangsung dalam masyarakat kita. Kita harus melakukan perubahan yang dapat menyetatkan sistem pendidikan kita dari penyakit naivitas politik.

Tindakan-tindakan yang perlu dilakukan dalam hal ini adalah dengan cara meninjau sistem pendidikan kita secara internal dan secara eksternal. Ditinjau secara internal, reformasi pendidikan baru dapat dilaksanakan dengan benar apabila telah dilakukan langkah nyata untuk mengembalikan fungsi pendidikan sepenuhnya kepada sekolah-sekolah kita. Ditinjau secara eksternal, reformasi pendidikan baru dapat dikatakan terjadi kalau telah dilakukan langkah-langkah yang membuat sistem pendidikan kita menjadi integral dengan reformasi besar yang kita dambakan bersama sekarang ini, reformasi politik, reformasi ekonomi, hukum, kultural, dan lain-lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Reformasi Pendidikan Nasional

Reformasi secara etimologi berasal dari kata formasi, yang berarti susunan atau bentuk susunan instansi. Pendidikan yaitu pengetahuan tentang mendidik. Nasional yaitu yang berkenaan dengan bangsa sendiri. Reformasi berarti perubahan radikal untuk perbaikan dalam bidang sosial, politik atau agama dalam suatu masyarakat atau negara. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan pada peraturan negara tersebut, misalkan di negara Indonesia berarti pendidikan nasional Indonesia adalah pendidikan yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

2. Perkembangan Reformasi di Indonesia

Reformasi yang terjadi pada tahun 1998 berdampak langsung pada Bangsa kita, bukan saja pada bidang politik dan ekonomi, tetapi juga pada bidang pendidikan. Reformasi itu sebagai momentum untuk melakukan pembaharuan sistem perundang-undang pendidikan di Indonesia. Diawali UUD 1945 oleh DPR-MPR tahun 2002, terutama pasal 31 yang mengamanatkan pada Negara/pemerintah untuk memperbaiki/menyempurnakan sistem pendidikan nasional. Kemudian dikeluarkan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Sebagai tindak lanjut dari UU tersebut dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Setelah Indonesia mengalami reformasi tersebut, kemudian kita memasuki era baru, yaitu era setelah tumbanganya orde baru yaitu orde reformasi. Orde reformasi dapat difahami sebagai orde keterbukaan dalam mengemukakan pendapat. Orde keterbukaan ini bukan hanya dimanfaatkan oleh kalangan pers dan politik saja, akan tetapi juga untuk dunia pendidikan. Maka memasuki Millennium ketiga ini dunia pendidikan dihadapkan kepada berbagai permasalahan pelik yang apabila tidak diatasi secara cepat, tidak mustahil pendidikan di Indonesia akan ditinggal oleh zaman. Menurut hemat saya, langkah preventif dalam menyikapi tantangan ini, maka sangat diperlukan kesadaran akan tampilnya dunia pendidikan guna memecahkan dan merespon berbagai tantangan baru di era Global ini adalah hal yang logis bahkan suatu keharusan. Hal ini dapat dimengerti mengingat dunia

pendidikan merupakan salah satu pranata yang terlibat langsung dalam mempersiapkan masa depan bangsa ke arah lebih baik. Perlu disadari dan diwaspadai bersama, bahwa kegagalan dunia pendidikan dalam menyiapkan mada depan bangsa, adalah merupakan kegagalan bagi kelangsungan kehidupan bangsa Indonesia.

Reformasi akan berhasil apabila tersedia kekuatan yang mendorong terjadinya perubahan. Artinya, perlu ada momentum yang mendukung, seperti perombakan besar-besaran dalam system pemerintahan, ada undang- undang yang melindungi, atau pemimpin yang peduli akan pentingnya reformasi. Akhirnya, reformasi pendidikan tersebut harus dijadikan sebagai kebijakan pendidikan. Artinya, reformasi pendidikan itu dijadikan patokan kebijakan jangka panjang dalam setiap langkah pengambilan keputusan prektik pendidikan. Reformasi harus berada dalam kerangka kerja jangka panjang dan menjadi inti dari setiap kebijakan dan operasional pendidikan[2].

Apabila reformasi pendidikan akan dijadikan sebagai kebijakan, maka harus memenuhi empat tahapan. Menurut Levin Benjamin (2001:9), tahapan-tahapan itu satu sama saling terkait, yaitu; asal-usulnya, adopsinya, implementasi dan hasilnya. Pertama, adalah asal-usulnya (origin), darimana datangnya usulan reformasi pendidikan tersebut? Bagaimana reformasi pendidikan menjadi bagian dari aspek pemerintahan secara umum, peran apa yang dimainkan oleh masing-masing pihak dalam mengembangkan program tersebut.

Kedua, bagaimana mengadopsi (adoption) kebijakan tersebut yang akhirnya menjadi peraturan atau perundang-undangan. Untuk itu, perlu juga dipantau sejauhmana perbedaan antara yang diusulkan dengan yang diundangkan dan apa-apa penyebab dari perbedaan tersebut.

Ketiga, bagaimana implementasinya (implementation)? Dalam hal ini, untuk melakukan reformasi kebijakan maka diperlukan lembaga penelitian untuk memantau pelaksanaan reformasi. Model seperti apa yang digunakan oleh pemerintah sehingga mampu menggerakkan reformasi hingga ke tingkat operasional? Pertanyaan lain adalah kebijakan apa yang mendukung adanya reformasi dan bagaimana sistem pendidikan merespon gerakan reformasi tersebut?

Keempat, bagaimana hasil-hasilnya (outcomes)? Bukti-bukti apa yang menunjukkan adanya perubahan sebagai akibat dari reformasi yang dilakukan. Dalam pendidikan, bukti nyata biasanya adalah bagaimana reformasi berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar di kalangan siswa, terjadinya peningkatan kinerja pada guru dan dosen serta tenaga kependidikan, adanya kenaikan jumlah kelulusan, dan sebagainya.

3. Idealitas masa depan Indonesia yang diinginkan

Masa depan yang kita cita-citakan adalah masyarakat yang beranggotakan orang-orang yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa (,abdullah/hamba Allah yang mengerti tujuan hidupnya adalah untuk beribadah), sebagai makhluk individu, dan sebagai makhluk sosial (anggota masyarakat setempat, daerah, nasional, internasional). Orang-orang yang demikian adalah mereka yang berimtaq (memiliki kecerdasan spiritual), beripteks (memiliki kecerdasan intelektual dan seni), berkepribadian Indonesia yang kuat (memiliki kecerdasan emosional Indonesia), sadar hukum, demokratis, mencintai dan mempraktekkan keadilan, kebenaran, dan kedamaian, dan sehat jasmani dan rohani[3].

Kecerdasan spiritual seseorang adalah kemampuan dan kemauan diri untuk selalu berpedoman pada ajaran-ajaran agamanya saat membuat keputusan dan mengatasi masalah kehidupan, yang mencakup kemampuan dan kemauan membedakan yang benar dan yang salah dalam upaya mengelola kehidupannya, kemampuan dan kemauan menghormati agama dan kepercayaan orang lain, dan kemampuan dan kemauan untuk bergaul dengan pengikut

agama dan kepercayaan lain dengan prinsip saling menghargai dan saling menghormati. Kecerdasan intelektual dan seni mencakup kemampuan menyerap dan menyimpan informasi yang bermanfaat dalam otaknya, kemampuan memahami konsep-konsep abstrak dan dalil/asas, dan kemampuan dan kemauan menerapkan secara kritis-kreatif konsep-konsep dan dalil/asas untuk pemecahan masalah kehidupan nyata serta memiliki rasa keindahan yang tinggi. Kecerdasan emosional (emotional intelligence) mencakup kesadaran-diri dan pengendalian gejala hati (self-awareness and impulse control), ketekunan (persistence), semangat (zeal), emosi-diri (self-emotion), empati, dan keterampilan social.

Orang yang mencapai perkembangan semua potensi seperti diuraikan di atas akan mampu menjawab tantangan jaman dari tingkat perorangan, lokal, daerah, nasional sampai tingkat internasional. Pengembangan manusia yang demikian memerlukan dukungan politik pendidikan dan kebudayaan, dan kebijakan dan program pendidikan yang tepat dan relevan, yang mampu mendorong partisipasi aktif kontributif seluruh komponen bangsa. Jika pemerintah dan seluruh komponen bangsa ini terlibat untuk menangani secara tepat, maka pendidikan akan dapat memainkan peranan kunci untuk meraih keberhasilan pembentukan manusia yang dicita-citakan tersebut. Berkenaan dengan berbagai problematika pendidikan yang terjadi sekarang ini, maka perlu dilakukan upaya-upaya strategis, diantaranya sebagai berikut :

1. Tujuan pendidikan pada zaman sekarang ini tidak cukup dengan hanya memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, keimanan dan ketaqwaan saja, tetapi juga harus diupayakan melahirkan manusia yang kreatif, inovatif, produktif dan mandiri, mengingat era global ini adalah dunia yang kompetitif.
2. Hilangkan sistem dikotomik. Bangunan ilmu pengetahuan yang dikotomik antara ilmu-ilmu agama dan ilmu pengetahuan modern (umum) harus diubah menjadi pandangan baru yang lebih holistik atau setidaknya bersifat komplementer.
3. Guru maupun dosen di zaman sekarang dan di masa yang akan datang adalah guru yang disamping memiliki informasi, berakhlak baik dan mampu menyampaikan secara metodologis, juga harus mampu mendayagunakan berbagai sumber informasi yang tersebar di tengah masyarakat ke dalam kegiatan belajar-mengajar. Dengan demikian pembelajaran harus terpusat pada peserta didik yang pada gilirannya dapat menimbulkan/menciptakan masyarakat belajar.
4. Pemerintah pusat maupun daerah harus memberi prioritas dalam mengalokasikan anggaran pendidikan bagi setiap satuan pendidikan di seluruh tanah air. Dan jika memungkinkan alokasi anggaran 20 % dinaikkan lagi menjadi 30 %, dan itu diluar gaji pegawai negeri sebagaimana yang dilakukan di Negara maju. Hal ini bertujuan untuk :
 - 1) Meningkatkan atau mendongkrak kualitas pendidikan yang sudah agar lebih maksimal dan optimal serta memiliki daya saing bangsa
 - 2) Meningkatkan kesempatan dan pemerataan pendidikan bagi rakyat tanpa ada diskriminasi apapun
 - 3) Mengurangi kekurangan struktur biaya pendidikan (netralisasi kemakmuran)
 - 4) Pemerintah melalui Kementerian terkait (Kemendikbud dan Kementerian Agama yang membawahi pendidikan) hendaknya memberikan kewenangan yang longgar kepada satuan pendidikan untuk dapat mengaplikasikan konsep Total Quality Management untuk menciptakan suatu perubahan ke arah yang lebih bermutu, serta dapat menciptakan budaya mutu yang baik sehingga hasil dan proses pendidikan tersebut diharapkan akan lebih berkualitas.

Manajemen di setiap satuan pendidikan akan lebih efektif jika para pengelolanya mampu melibatkan stakeholders (peserta didik, orang tua, masyarakat pengguna alumni) untuk menciptakan suatu inovasi-inovasi guna memajukan kualitas pendidikan yang sudah ada. Oleh karena itu diperlukan kebijakan yang mendasar agar menerapkan sistem manajemen institusi pendidikan selalu relevan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, hal itu dapat ditempuh salah satunya dengan mengaplikasikan Total Quality Manajemen (Manajemen Kualitas Terpadu), mengingat peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan di Indonesia cukup fleksibel dalam merespon perubahan yang memungkinkan kita melaksanakan manajemen mutu terpadu sebagaimana yang dilakukan dalam dunia bisnis, meskipun manajemen mutu dalam dunia bisnis tidak dapat sepenuhnya ditransformasikan dalam dunia pendidikan, karena memang pendidikan di Indonesia bersifat Nir-Laba. Namun bukankah perbaikan mutu yang lebih baik dari standar yang sudah ditetapkan tidak dilarang oleh undang-undang? Jika ini diaplikasikan dalam dunia pendidikan khususnya di Indonesia, insya Allah manajemen pendidikan di negeri ini mengalami perubahan yang positif, dan besar harapan kualitas pendidikan di masa depan dapat lebih baik dari saat ini.

KESIMPULAN

Reformasi pendidikan adalah upaya perbaikan pada bidang pendidikan. Reformasi pendidikan yang terprogram menunjuk pada kurikulum atau program suatu institusi pendidikan. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan pada peraturan negara tersebut, misalkan di negara Indonesia berarti pendidikan nasional Indonesia adalah pendidikan yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

REFERENSI

- [1] Nawawi, "Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan, Reformasi Pendidikan Sebagai Tuntutan Sejarah, Vol 11, No.2, April," 2006.
- [2] M. Hidayat Ginanjar, "Jurnal Pendidikan Islam, Reformasi Pendidikan dan Strategi Pembaharuan Sistem Pendidikan Nasional di Era Global, Vol 1, No. 01," 2012.
- [3] Nurhikmah, "kapita selekta pendidikan, (Makassar : universitas negeri Makassar)," 2018.